

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan rangkaian upaya maupun proses guna memberikan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dalam proses pembangunan, berbagai perubahan telah terjadi dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan adalah suatu proses yang harus memusatkan perhatian pada kebutuhan yang ada dan merespon kebutuhan perubahan zaman yang dibawa oleh perubahan sosial dan perkembangan peradaban, perkembangan sistem sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rifky R, 2018).

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan memberikan kesempatan kerja. Pada awalnya pembangunan merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan negara, sedangkan masyarakat adalah obyek pembangunan, atau pasif. Tetapi pandangan yang berkembang saat ini adalah bahwa pembangunan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, namun mencakup peran masyarakat dan pihak ketiga seperti dunia usaha serta pemangku kepentingan yang bersangkutan. (Rifky R, 2018).

Paradigma pembangunan pada saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pembangunan manusia dengan memperhatikan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Salah satu tolak ukur untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang berasal dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan ketiga indikator tersebut diharapkan kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan (Diba, Fathorrazi, & Somaji, 2018).

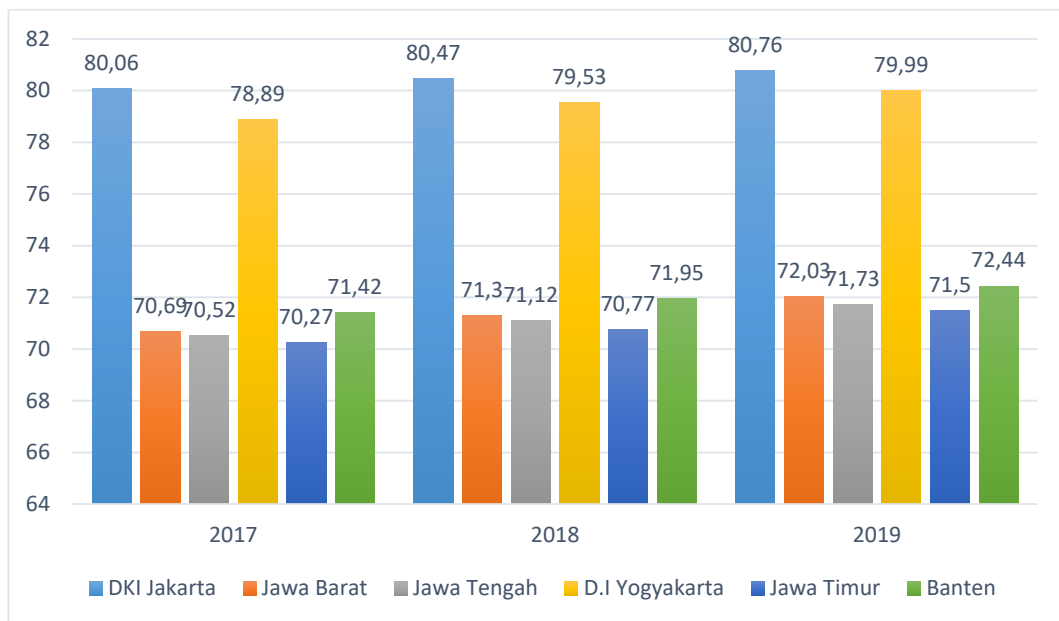
Tujuan akhir pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan individu di suatu negara atau wilayah tertentu. Masyarakat diharapkan mampu menjadi subjek pembangunan dan tidak menjadi objek dari pembangunan ekonomi supaya masyarakat akan menerima kontribusi yang lebih berguna di

suatu daerah secara makro dalam rangka memajukan negara atau wilayah tersebut.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Adapun permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia maupun tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta keahlian yang baik di segala bidang akan sangat dibutuhkan. Sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah, pembangunan sumber daya manusia perlu dilakukan.

Sebagai negara kepulauan, pulau-pulau yang terdapat di Indonesia tentu memiliki potensi serta permasalahan yang berbeda-beda pada masing-masing daerahnya. Pulau Jawa menjadi pulau yang terbesar di Indonesia serta memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal itu dikarenakan, Pulau Jawa menjadi letak dari Ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Masyarakat yang berada di daerah-daerah di Pulau Jawa pun menjadi lebih mudah dalam mengakses suatu hal untuk keberlangsungan hidupnya. Hal ini menjadi salah satu alasan dari kondisi perkembangan pembangunan manusia di daerah-daerah di Pulau Jawa yang semakin membaik.

Adanya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut lebih mudah untuk diperoleh oleh masyarakatnya. Rata – rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia memiliki nilai yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Rata – rata indeks pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang tidak terpaut jauh berbeda dengan nilai indeks pembangunan di Indonesia. Akan tetapi nilai indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tidak termasuk dalam peringkat 10 terbesar di Indonesia. Provinsi Jawa Timur masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah pulau dan luar pulau Jawa lainnya.



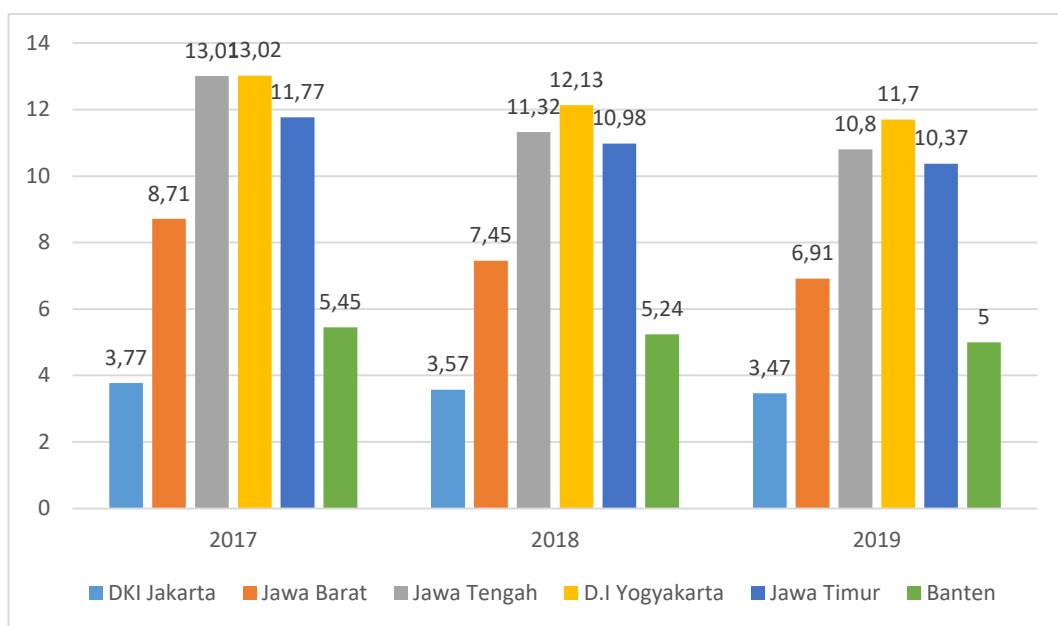
Sumber: BPS Nasional, 2020

Gambar 1.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (Indeks)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut terutama pada 2017 sampai 2019 provinsi dengan nilai IPM tertinggi pada urutan pertama adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 80.06 indeks pada tahun 2017 meningkat menjadi 80.47 indeks pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 80.76 indeks. Disusul oleh Provinsi D.I Yogyakarta pada urutan kedua dengan IPM sebesar 78.89 indeks pada tahun 2017 meningkat menjadi 79.53 indeks pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 79.99 indeks. Provinsi yang memiliki IPM paling rendah diantara provinsi lain adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 70.27 indeks pada tahun 2017 meningkat menjadi 70.77 indeks pada tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi 71.5 indeks. Meskipun IPM di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan tetapi masih tergolong kedalam IPM paling rendah diantara provinsi lain di Pulau Jawa.

Kemiskinan dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal, sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Apabila kondisi kemiskinan di suatu daerah tinggi, maka hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan dari pembangunan ekonomi. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat berkurang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator dalam meningkatkan kualitas manusia secara bersama-sama tidak dapat terlaksana. Pada akhirnya penduduk miskin kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak dan menyebabkan kesejahteraan tidak dapat dicapai. (Irawan, 2020).



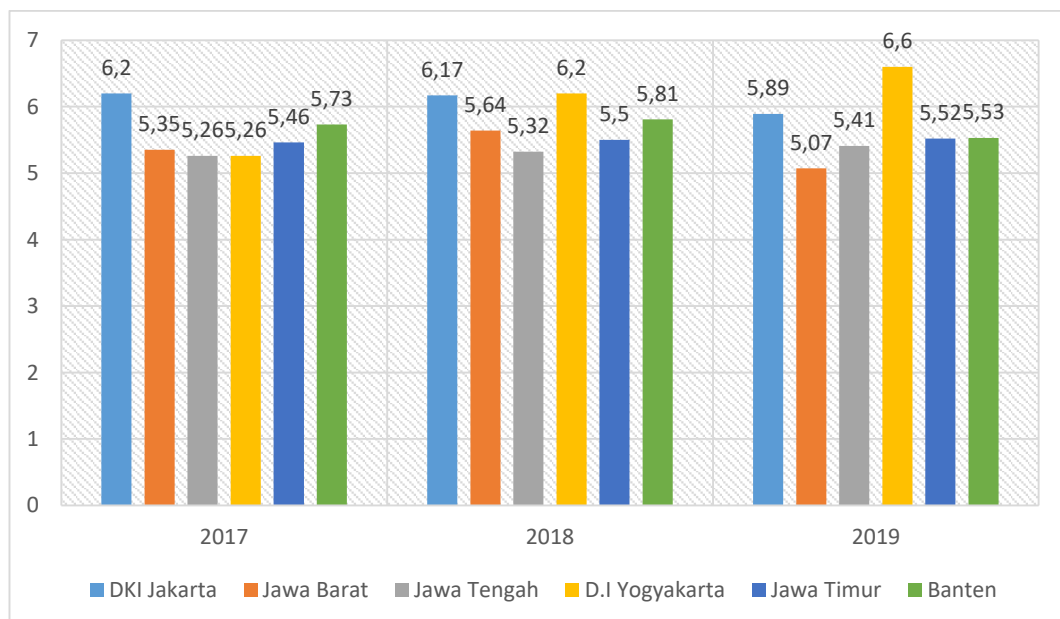
Sumber: BPS Nasional, 2020

Gambar 1.2 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017 – 2019 (persen)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur berada pada urutan keempat terendah secara berturut-turut diantara provinsi lain di Pulau Jawa setelah Provinsi DKI Jakarta pada urutan pertama dengan persentase sebesar 3.77 persen pada tahun 2017 turun menjadi 3.57 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2019 turun menjadi 3.47 persen. Kemudian Provinsi Banten berada pada urutan kedua dengan presentase sebesar 5.45 persen pada tahun 2017 turun

menjadi 5.24 persen hingga tahun 2019 turun menjadi 5 persen. Disusul Provinsi Jawa Barat pada urutan ketiga dengan presentase sebesar 8.71 persen pada tahun 2017 turun menjadi 7.45 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2019 turun menjadi 6.91 persen. Hingga Provinsi Jawa Timur dengan presentase sebesar 11.77 persen pada tahun 2017 turun menjadi 10.98 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 10.37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Timur cukup baik karena data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan pada setiap periode terutama pada tahun 2017 sampai 2019.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak atau meningkat, maka masyarakat akan mudah mencapai kesejahteraan sehingga kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut juga meningkat (Irawan, 2020).

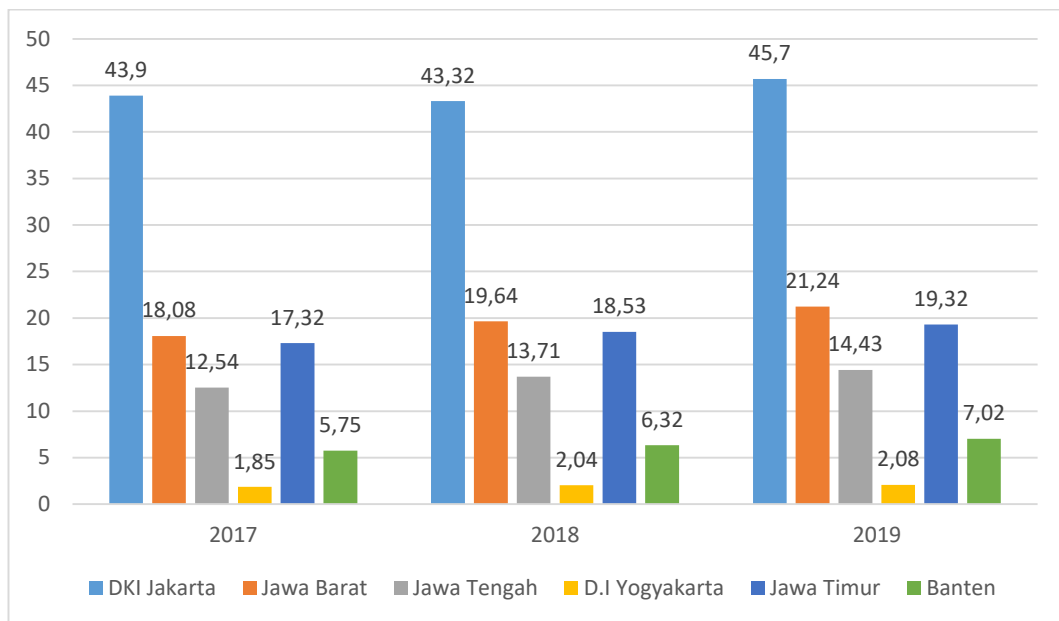


Sumber: BPS Nasional, 2020

Gambar 1.3 Perbandingan Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (2010) Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (persen)

Pada gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur memiliki laju PDRB yang tergolong tinggi yaitu berada pada urutan ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dengan laju PDRB sebesar 6.2 persen dan Provinsi Banten dengan laju PDRB sebesar 5.73 persen, kemudian laju PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 5.46 persen. Pada tahun 2018 laju PDRB Provinsi Jawa Timur kembali berada pada urutan kelima tertinggi diantara provinsi di Pulau Jawa setelah Provinsi D.I Yogyakarta dengan laju PDRB sebesar 6.17 persen pada urutan pertama kemudian Provinsi DKI Jakarta dengan laju PDRB sebesar 6.2 persen pada urutan kedua disusul Provinsi Banten dengan laju PDRB sebesar 5.81 persen pada urutan ketiga dan Provinsi Jawa Barat dengan laju PDRB sebesar 5.64 persen pada urutan keempat hingga Provinsi Jawa Timur dengan laju PDRB sebesar 5.5 persen. Pada tahun 2019 laju PDRB Provinsi Jawa Timur kembali berada pada urutan keempat tertinggi diantara provinsi di Pulau Jawa setelah Provinsi D.I Yogyakarta dengan laju PDRB 6.6 persen pada urutan pertama kemudian Provinsi DKI Jakarta dengan laju PDRB sebesar 5.89 persen pada urutan kedua disusul Provinsi Banten dengan laju PDRB sebesar 5.53 persen pada urutan ketiga dan Provinsi Jawa Timur dengan laju PDRB sebesar 5.52 persen. Meskipun tidak berada pada urutan pertama, laju PDRB Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan pada setiap periode terutama selama tahun 2017 sampai 2019.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut. PAD menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah karena PAD sangat bertumpang pada pendapatan daerahnya sendiri. Apabila daerah dapat menghasilkan pendapatan yang banyak atau meningkat, maka daerah tersebut dapat dengan mudah untuk memenuhi atau membiayai kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pembiayaan yang dilakukan daerah untuk menekan permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan mengatasi permasalahan lain pada pembangunan manusia dapat terlaksana (Diba, Fathorrazi, & Somaji, 2018).



Sumber: BPS Nasional, 2020

Gambar 1.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (miliar rupiah)

Dari gambar 1.4 dapat diketahui bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Timur berada di urutan ketiga tertinggi selama tahun 2017 sampai 2019 secara berturut-turut. Daerah yang berada di urutan pertama adalah Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi PAD sebesar 43.9 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 43.32 miliar rupiah pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 45.7 miliar rupiah. Kemudian Provinsi Jawa Barat berada di urutan kedua dengan realisasi PAD sebesar 18.08 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 19.64 miliar rupiah hingga tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 21.24 miliar rupiah. Pada urutan ketiga dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan realisasi PAD sebesar 17.32 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 18.53 miliar rupiah pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 19.32 miliar rupiah. hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang cukup baik karena terdapat peningkatan pada setiap periode.

Faktor-faktor dalam perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu negara maupun daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Beberapa diantaranya adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Ketika kemiskinan itu rendah, maka akan lebih banyak masyarakat yang dapat lebih mudah dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mampu untuk membayarnya. Faktor berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan produksi barang dan jasa di daerah tersebut menunjukkan kondisi yang baik dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya termasuk pembangunan manusia yang juga akan meningkat. Kemudian faktor PAD juga berpengaruh terhadap IPM, karena ketika PAD di suatu daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, maka daerah tersebut dapat memberikan kemudahan untuk masyarakatnya dalam mengakses berbagai hal untuk tujuan pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa uraian data diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama periode 2011 - 2019. Hal ini karena tingkat IPM Provinsi Jawa Timur tergolong IPM dengan nilai terendah diantara provinsi lain di Pulau Jawa, sedangkan faktor ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan menunjukkan adanya penurunan di setiap periode. Kemiskinan menjadi permasalahan yang dapat berdampak buruk pada pembangunan manusia. Dimana masalah kemiskinan diakibatkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli yang rendah dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan fasilitas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan fasilitas-fasilitas tersebut sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan manusia (Syofya, 2018).

Serta kondisi perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami peningkatan pada setiap periode. Produktifitas menjadi salah satu dari empat pilar pokok yang dibutuhkan dalam pembangunan manusia. Masyarakat seharusnya mampu meningkatkan produktifitasnya dan berkontribusi penuh untuk mendapatkan pendapatan dan upah dari sebuah pekerjaan. Apabila produktifitas

meningkat, maka pembangunan manusia bisa terlaksana. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia (UNDP, 1995).

Dan perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada setiap periode. Diharapkan PAD mampu menjadi salah satu dari sumber APBD secara dominan karena tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya dapat diukur dari jumlah PAD yang dihasilkan. Daerah akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan manusia tanpa tersedianya PAD yang merupakan sumber keuangannya (Fretes, 2017). Dari ketiga faktor tersebut seharusnya bisa menjadi pendorong tingginya IPM Provinsi Jawa Timur, namun hal ini belum dapat terlaksana.

Alasan utama penulis memilih Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian adalah karena Provinsi Jawa Timur memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang perkembangannya pesat. Bahkan, Jawa Timur mampu bersaing dengan provinsi besar lainnya terutama dari segi pembangunan ekonomi. Namun, dalam pembangunan manusia Jawa Timur masih kalah bersaing dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Alasan lain yaitu karena penulis termasuk penduduk Jawa Timur yang memiliki pemahaman sedikit lebih banyak informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur beserta faktor yang mempengaruhi yang digunakan dalam variabel dalam penelitian ini dibandingkan pemahaman mengenai provinsi lain.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur?

- c. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur selama periode 2011-2019.

1.4 MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah, disamping sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam penelitian lebih lanjut yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pembangunan manusia atau meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Timur.
- b. Sebagai acuan informasi bagi Swasta yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembangunan manusia.
- c. Sebagai acuan informasi bagi masyarakat yang bermanfaat untuk upaya meningkatkan IPM melalui faktor-faktor pendorong terkait pembangunan manusia.